

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 31 dan 32 yang menyatakan bahwa Kepala Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual, yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan *asset*, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli & Tumilaar pada tahun 2019 dengan

judul “Penerapan Proses Pembukuan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)”, hasil penelitian tersebut penyusunan laporan keuangan masih sering tidak melakukan pencatatan sehingga menghambat dalam proses laporan keuangan selanjutnya. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman untuk menerapkan laporan keuangan dalam perusahaan.

Perubahan akuntansi pemerintah dari Cash Toward Accrual (CTA) menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pendapat pro- kontra mengenai siap dan tidak siapnya pemerintah daerah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling dominan muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Ditetapkan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Diharapkan dengan adanya pedoman tersebut maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung peningkatan *good governance*. Penerapan PP No. 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berlaku untuk semua entitas.

Dalam hal ini semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus menjalankan fungsi pemerintah dan sebagai pelayanan public. Dalam melakukan pelayanan publik, diperlukan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun penggunaan APBD ini dipertanggungjawabkan berupa pencatatan dan pelaporan keuangan. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas SensorikNetra Wyata Guna yang merupakan SKPD dari Dinas Sosial yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Wyata Guna memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk belanja. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan tidak sesuai apa yang seharusnya dilakukan. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Wyata Guna memang sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual akan tetapi setiap penyajian laporan keuangan selalu mengalami keterlambatan waktu pelaporan, hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengambil judul adalah **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra)Wiyata Guna Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Proses laporan keuangan tidak berbasis komputerisasi di BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra) Wiyata Guna Bandung.
2. Belum optimalnya penyajian laporan keuangan di BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra) Wiyata Guna Bandung.
3. Kurangnya pengetahuan akan adanya aplikasi untuk proses penyajian laporan keuangan di BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra) Wiyata Guna Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana prosedur Laporan Keuangan BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra) Wiyata Guna Bandung?
2. Apa hambatan dalam proses Laporan Keuangan BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra) Wiyata Guna Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra) Wiyata Guna Bandung, jika sistemnya belum terkomputerisasi?

1.4 . Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pembuatan laporan keuangan yang dilakukan BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra) Wiyata Guna Bandung. Agar terkontrol dengan jelas dan digunakan dengan baik.

1.4.2 2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembuatan laporan keuangan di BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra) Wyata Guna Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam pembuatan laporan keuangan yang dihadapi di BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas Sensorik Netra) Wyata Guna Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra) Wyata Guna Bandung, untuk mengatasi hambatan pembuatan laporan keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Menyiapkan diri agar dapat menyesuaikan perkembangan yang terjadi dalam era globalisasi pada masa yang akan datang.
2. Mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dan dibutuhkan untuk mulai memasuki dunia kerja.
3. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan, kemampuan dan hal-hal baru yang diperoleh dari dunia kerja, khususnya yang terkait dibidang laporan keuangan.
4. Mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan didalam dunia kerja yang nyata. Mampu memahami kondisi dan bisa beradaptasi dengan situasi baru didunia kerja.

1.5.2 Kegunaan Akdemis

1. Untuk membina dan meningkatkan Kerja sama antara instansi pemerintah dengan pihak Universitas Komputer Indonesia Bandung.
2. Mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperluas di Universitas.
3. Sebagai alat penilai untuk penyempurnaan kurikulum yang sesuai dalam kebutuhan dunia kerja sehingga lulusan yang dikeluarkan adalah lulusan yang

kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja.

4. Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

1.6.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Sosial Republik Indonesia, BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra).

Berikut ini adalah identitas lengkap tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek:

Nama Lembaga : Kementerian Sosial Republik Indonesia Bandung

Alamat : Jl. Pajajaran No. 50-52

Telepon/Fax : (022) 4205214 / (022) 4205214

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan terhitung dari November sampai dengan Februari 2023.

Table 1.1 Waktu Pelaksanaan Kegiat

Keterangan	Bulan															
	Nov				Des				Januari				Feb			
Minggu Ke	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I. Persiapan																
1. Matriks Penelitian	■	■														
2. Proposal Penelitian			■	■												
3. Survei Tempat Penelitian		■	■	■												
4. Membuat Surat Pengantar Penelitian	■															
II. Pelaksanaan																
1. Pengajuan Surat Pengantar Penelitian		■	■													
2. Surat Keterangan Izin Penelitian				■												
3. Penelitian					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
III. Pelaporan																
1. Bimbingan dan Penyusunan Laporan Penelitian Tugas Akhir					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Penyerahan Laporan Penelitian Tugas Akhir														■	■	
3. Sidang Laporan Penelitian Tugas Akhir															■	■